

NOMOR : 700.1.2/28/INSP-D/LHE/2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Propinsi Sumatera Barat
Email : inspektoratdaerahkab.solok@gmail.com

Arosuka, 23 Agustus 2025

Nomor : 700/ **28** /INSP-D/M/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025**

Kepada
Yth. Kepala Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
di
Arosuka

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP DAN DAMKAR) Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Perintah Nomor. 700.1.2/430/INSP-D/2025 tanggal 11 Juli 2025 dan No. 700.1.2/520/INSP-D/M/2025 Tanggal 20 Agustus 2025

2. Latar Belakang Evaluasi.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan percepatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atas implementasi AKIP.

3. Tujuan Evaluasi.

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah:

- Memperoleh Informasi tentang implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Menilai tingkat Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. Teknik Evaluasi.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan teknik evaluasi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Analisis dokumen
- c. Wawancara;
- d. Studi dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah.

Dinas Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, melaksanakan administrasi Satpol PP dan Damkar dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tata Kelola kepegawaian dilaksanakan terhadap 47 orang PNS dan 218. orang THL,

Jumlah PNS tersebut terdiri dari:

- a. 22 orang golongan II
- b. 21 orang golongan III
- c. 4 orang golongan IV

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Nama : **Elafki, S.Pd.MM**
Nip : 19691112 200001 2 100
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV.b)

Sekretaris

Nama : **Drs. Muhammad Alfajri**
Nip : 19700602 198902 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Nama : **Deki, SH**
Nip : 19670816 198803 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Nama : **Rubi Ekha Putra, SE, MM**
Nip : **19841228 200604 1 006**
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Nama : **Jon Afnel Hendri, S.Sos, MM**
Nip : 19710923 200604 1 008

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Nama : **Marlaini, S.Pd, MM**

Nip : 19681215 199702 2001

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Anggaran 2024

Anggaran belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu:

Anggaran	:	Rp. 14.724.051,357,00
Realisasi Belanja	:	<u>Rp 14.230.305.057,00</u>
Sisa Anggaran	:	Rp 493.746.300,00

Anggaran 2025

Anggaran belanja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 yaitu:

Anggaran	:	Rp. 12.900.224,886,00
Realisasi Belanja	:	<u>Rp 5.617.642.827,00</u>
Sisa Anggaran	:	Rp 7.282.582.059,00

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 terdapat 15 (lima belas) saran dan rekomendasi. Yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan rekomendasi .

II. HASIL EVALUASI

1. Kriteria dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi Akuntabilitas internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai. Adapun pun predikat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

2. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** memperoleh skor **71,55** dari nilai maksimum 100 atau predikat **BB (Sangat Baik)**.

Pencapaian nilai Akuntabilitas tersebut digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Komponen yang dinilai	Predikat	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75
	Jumlah		71,55

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;	6,00	B	4,20
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);	9,00	B	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	15,00	B	10,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan;	6,00	B	4,20
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;	9,00	B	6,30
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50
3	Pelaporan Kinerja.	15,00	10,80	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;	3,00	BB	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;	4,50	B	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7,50	B	5,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	25,00	18,75	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;	5,00	BB	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;	7,50	BB	6,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	12,50	B	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	BB	71,55

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja secara keseluruhan memperoleh capaian sebesar 21,00% dari bobot tertinggi sebesar 30,00%. Hal ini disebabkan :

- 1) Dalam penyusunan anggaran (program kegiatan) pada DPA tahun 2025 belum mempedomani anggaran hasil analisis kebutuhan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja tahun 2025 yang telah ditetapkan.
- 2) Belum adanya bukti dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (Renja, PK, Rencana Aksi) dilaksanakan melalui rapat dan pembahasan yang melibatkan Pimpinan dan seluruh pegawai.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja secara keseluruhan memperoleh capaian sebesar 21,00% dari bobot tertinggi sebesar 30,00%. Hal ini disebabkan:

- 1) Belum menetapkan SOP tentang Pengumpulan data Kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan kinerja secara keseluruhan memperoleh capaian sebesar 10,80 dari bobot 15,00%. Hal ini disebabkan:

- 1) Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pelaporan kinerja memiliki skor sebesar 18,75 dari bobot 25.00. Hal ini disebabkan:

- 1) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Saran

Disarankan kepada Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP dan DAMKAR), agar:

- a. Kedepannya dalam menyusun anggaran program/kegiatan pada dokumen DPA agar mempedomani analisis kebutuhan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renja tahunan.
- b. Melaksanakan perumusan dan penetapan perencanaan kinerja secara bersama dalam rapat yang melibatkan seluruh jajaran di buktikan dengan notulen hasil rapat, dokumentasi, daftar hadir.
- c. Menetapkan SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja.
- d. Dalam menyusun Dokumen Laporan Kinerja agar mempedomani aturan yang berlaku (Permenpan Nomor 53 tahun 2014) diantaranya menginfokan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- e. Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IV. Penutup

Demikianlah laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP dan DAMKAR) Kabupaten Solok Tahun 2025 untuk bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan saran.

Mengetahui,
INSPEKTUR DAERAH,


DERY AKMAL, ST
NIP.19840414 201101 1 010

Tim Evaluator,
Dalnis,


MIENCE DASRIL, SE
NIP. 19801009 200604 2 003
Ketua


YULIANA, SE, QRMA
NIP. 19930723 201903 2 002
Anggota


NETTI HERAWATI, SE
NIP.1971 200804 2 017
Anggota


BISRI MUTHOVA, SE
NIP.19680322 199307 1 001
Anggota


SRI HIDAYATI, S.Pd
NIP.19731106 200701 2 004

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,40	71,55
			B	BB

No	Catatan
1	Dalam penyusunan anggaran (program kegiatan) pada DPA tahun 2025 belum mempedomani anggaran hasil analisis kebutuhan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja tahun 2025 yang telah ditetapkan.
2	Belum adanya bukti dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (Renja, PK, Rencana Aksi) dilaksanakan melalui rapat dan pembahasan yang melibatkan Pimpinan dan seluruh pegawai.
3	Belum menetapkan SOP tentang Pengumpulan data Kinerja.
4	Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
5	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Rekomendasi	
	Disarankan kepada Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar agar:
1	Kedepannya dalam menyusun anggaran program/kegiatan pada dokumen DPA agar mempedomani analisis kebutuhan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renja tahunan.
2	Melaksanakan perumusan dan penetapan perencanaan kinerja secara bersama dalam rapat yang melibatkan seluruh jajaran di buktikan dengan notulen hasil rapat, dokumentasi, daftar hadir.
3	Menetapkan SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja.
4	Dalam menyusun Dokumen Laporan Kinerja agar mempedomani aturan yang berlaku (Permenpan Nomor 53 tahun 2014) diantaranya menginfokan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
5	Memfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.